



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Beni Nugraha  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni  
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

M. Beni Nugraha



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Customer Perspectives</b>		
1 Terwujudnya good governance dan clean government	1 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 Nilai (BB)
	2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Opini
	3 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,7 Nilai
<b>Internal Process Perspectives</b>		
2 Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	4 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen
	5 Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	90 %
	6 Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja	100 %
	7 Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	60 %
	8 Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu	maks. Kali 4
	9 Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100 %
3 Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	10 Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dokumen
	11 Prosentase pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara (4 kriteria)	100 %
	12 Persentase realisasi anggaran BSN	≥95 %
	13 Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali
	14 Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100 %
	15 Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100 %



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16 Persentase realisasi target penerimaan PNPB	100 %
4 Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	17 Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga	4 Dokumen
	18 Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur	100 %
	19 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2014	100 %
	20 Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang	100 %
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
5 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	21 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya	100 %
	22 Realisasi anggaran PKT	≥95 %
	23 Persentase pencapaian kinerja PKT	90 %
	24 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %
	25 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %
	26 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKT	75 %

**Kegiatan**

**Anggaran (Rp.)**

1 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

82.485.602.000

Pihak Kedua

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

Puji Winarni

M. Beni Nugraha